

**POLA KERJASAMA KOMITE SEKOLAH DENGAN GURU DALAM  
MENDUKUNG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI MTs.  
KADUAJA KECAMATAN GANDANG BATU SILLANAN  
KABUPATEN TANA TORAJA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada  
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

**SITTI RAHMAH**  
NIM 09.16.2.0175

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PALOPO**

**2014**

**POLA KERJASAMA KOMITE SEKOLAH DENGAN GURU DALAM  
MENDUKUNG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI MTs.  
KADUAJA KECAMATAN GANDANG BATU SILLANAN  
KABUPATEN TANA TORAJA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada  
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

**SITTI RAHMAH**  
NIM 09.16.2.0175

Dibimbing Oleh:

1. Drs. Syamsu Sanusi, M.Pd.I.
2. Drs. Efendi P., M.Sos.I.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PALOPO**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITTI RAHMAH**  
NIM : 09.16.2.0175  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

**IAIN PALOPO** Palopo, 12 September 2013

Penyusun,

**SITTI RAHMAH**  
NIM 09.16.2.0175

## ABSTRAK

**Rahmah, Sitti, 2013. “Pola Kerjasama Komite Sekolah dengan Guru dalam Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja”.** Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Pembimbing (I) Drs. Syamsu Sanusi, M.Pd.I. dan Pembimbing (II) Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Kata Kunci: Kerjasama Komite, Guru, Kegiatan Belajar Mengajar

Skripsi ini membahas tentang pola kerjasama komite sekolah dengan guru dan mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dimana penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yakni: 1. Bagaimana bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja, 2. Hambatan yang dihadapi komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja, serta 3. Upaya yang dilakukan komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam alternatif jawaban dari objek yang dikaji, yakni 1). Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan, 2). Wawancara atau interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan guru untuk mendapatkan data autentik, serta 3). Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis yang dapat memberikan keterangan lebih lengkap, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, dalil, teori, atau hukum-hukum serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel sederhana kemudian hasil olahan tersebut dijadikan acuan dasar untuk menganalisa secara kualitatif terhadap suatu permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan memberikan gambaran mengenai pola kerjasama komite sekolah dengan guru dan mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja.

Dengan demikian komite sekolah sebagai lembaga yang terbentuk dari luar sekolah dan bukan merupakan suatu lembaga formal yang menjadi lembaga penentu terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, akan tetapi komite sekolah dalam hal ini adalah mempunyai peran dan tanggungjawab yang lewat pengawasan praktis terhadap pelaku pendidikan mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, dalam hal ini pengawasan terhadap objek pendidik atau guru dan kepala sekolah yang termasuk didalamnya kinerja dari masing-masing pelaku pendidikan.

## P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum., Ketua STAIN Palopo, Wakil Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, yang senantiasa membina perguruan, di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A., Ketua STAIN Palopo, periode 2006-2010.
3. Drs. Hasri, MA., Ketua Jurusan Tarbiyah, dan Drs. Nurdin K., M.Pd., Sekertaris Jurusan Tarbiyah yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di STAIN Palopo.
4. Drs. Syamsu Sanusi, M.Pd.I., Pembimbing I dan Drs. Efendi P., M.Sos.I., Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

5. ST. Afiah, S.Ag., S.IPI., Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Ridwan, S.Ag., Kepala Madrasah beserta guru dan stafnya yang dengan senang hati menerima penulis dalam proses pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

7. Syafruddin, SE., Ketua Komite Sekolah beserta stafnya yang dengan senang hati membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tua tercinta Almarhum Abd. Latif dan Qonaah yang telah memelihara dan mendidik sejak lahir hingga dewasa dengan penuh pengorbanan lahir dan batin.

9. Kepada teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa amin.

Palopo, 12 November 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Definisi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Sekolah .....	13
C. Peranan Komite Sekolah dan Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar.....	21
D. Profesionalisme Guru dalam Proses Belajar Mengajar.....	30
E. Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Informan Subjek Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Singkat MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan. ....	45
B. Bentuk Kerjasama Komite Sekolah dan Guru dalam Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar .....	53
C. Hambatan yang Dihadapi Komite Sekolah dan Guru dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar .....	56
D. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah dan Guru dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Keadaan Guru di MTs. Kaduaja Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja .....	46
Tabel 4.2	Keadaan Siswa DI MTs. Kaduaja Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja .....	47
Tabel 4.3	Keadaan Sarana MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja .....	49
Tabel 4.4	Keadaan Prasarana MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja .....	50



**IAIN PALOPO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 /U/2002 tanggal 2 April 2002. Pembinaan sistem sekolah sebagai sub sistem dan pendidikan pra sekolah dalam sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya diarahkan pencapaian tujuan nasional. Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, disebutkan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Sebagai sub sistem pendidikan, satuan pendidikan yang disebut sebagai sekolah perlu dikelola dengan menggunakan parameter kebijakan nasional, yaitu: (1) pemerataan layanan pendidikan, (2) peningkatan kualitas pendidikan, (3) relevansi pendidikan, (4) efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam latar belakang wawasan nusantara dan memperhatikan kecenderungan perubahan di masa depan.<sup>2</sup> Secara empirik satuan pendidikan lahir sebagai jawaban kebutuhan belajar/pendidikan yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 2008), h. 6.

<sup>2</sup> Wahid Nurkencana, *Evaluasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h. 89.

tumbuh di masyarakat sehingga eksistensinya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, terbentuknya wadah sekolah yang cenderung didasarkan pada kesamaan motif, maka sekolah sebagai salah satu institusi formal harus memperhatikan adanya variabel-variabel, yakni: (1) dimensi-dimensi individu, (2) struktur yang mekanisme kegiatan, (3) dinamika kelompok untuk mewujudkan lembaga fungsional dan antar personal, (4) tujuan yang jelas mengendalikan semua kegiatan kelompok, dan (5) kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup> Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistikl dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air.<sup>5</sup> Dengan demikian merekalah yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>6</sup> Kepala sekolah dapat berunding dengan masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan bersama-sama termasuk mengatasi kekurangan sarana prasarana pendidikan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> N.A., Ametembun, *Guru dalam Administrasi Sekolah, Pembangunan*, (Bandung: IKIP Bandung, 1989), h. 51.

<sup>4</sup> Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1989), h. 79.

<sup>5</sup> Dirjen Dikti, *UUD 1945*, (Jakarta: 1988), h. 156.

<sup>6</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, (Konsep, Strategi dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 28.

<sup>7</sup> Nurcholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 42.

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah. Komite Sekolah sedapat mungkin bisa mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antar sekolah-sekolah dengan komite sekolah. Bukti tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada komite sekolah yaitu fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung serta fungsi mediator antara sekolah dengan masyarakat dengan masyarakat yang diwakilinya. Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan kebijakan sekolah ini, komite bukanlah bagian dari birokrasi pemerintah daerah tetapi sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap sekolah yang diwakili oleh komite sekolah. Perlu juga dipahami bahwa pengembangan Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan (BP3) terbukti tidak berhasil mobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Tetapi yang harus lebih dipahami adalah fungsi Komite Sekolah sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Sekolah yang hanya terbatas personalianya, akan sangat dibantu jika dibuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut memikirkan pendidikan di

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,h. 43.

sekolah-sekolah.<sup>9</sup> Komite sekolah di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, setidaknya telah diperoleh pemecahan masalah khususnya mengenai pembiayaan yang menyangkut kebutuhan sekolah, walaupun belum secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan terdapat dua sumber dana yang diperoleh sekolah, yakni dana rutin dan dana komite sekolah.

Dana rutin merupakan dana yang diperoleh sekolah dari subsidi pemerintah sedangkan dana Komite Sekolah merupakan dana yang diperoleh melalui sumbangan para orang tua murid yang jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dengan para orang tua tersebut, sumber dana yang diperoleh di Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dalam membiayai kebutuhan sekolah, dari hasil survei 2010 diketahui bahwa dana rutin yang diperoleh sekolah diarahkan untuk turut mengawasi proses belajar mengajar, kebutuhan alat tulis kantor (ATK) perkantoran dan pelaksanaan program-program sekolah. Sedangkan dana yang diperoleh dari Komite Sekolah diarahkan untuk membiayai pembangunan fisik, honor bagi guru yang memiliki jam mengajar lebih, kesejahteraan guru, pembiayaan listrik dan telpon dan fasilitas-fasilitas lainnya.<sup>10</sup>

Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, peserta didik harus dapat berkembang secara optimal dengan kemampuan untuk berkreasi, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemampuan mengatasi masalah dalam dirinya. Jika hal tersebut tercapai, maka peserta didik akan

---

<sup>9</sup> E. Mulyasa, *op.cit.*, h. 57.

<sup>10</sup> Hasil Observasi MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

mendapatkan kehidupan yang baik sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai warga negara.

Peserta didik dilahirkan dengan berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Potensi-potensi tersebut tidak mempunyai arti bila tidak dikembangkan dengan baik. Namun, tidak semua peserta didik memahami potensi yang dimilikinya, apalagi tentang cara mengembangkannya. Mereka seringkali menemui berbagai macam masalah belajar dan tidak mampu mengatasi persoalannya. Mereka membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain terutama guru agar dapat berbuat dengan tepat sesuai dengan potensi atau keadaan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, guru harus mengetahui lebih dari sekedar masalah mengajar yang efektif tapi ia juga harus dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya agar mereka dapat mengatasi kesulitan dalam belajar, sehingga memperoleh prestasi belajar yang optimal.<sup>11</sup>

Dewan pendidikan atau komite sekolah tidak perlu melaksanakan kegiatan studi atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data yang tersedia atau hasil-hasil penilaian yang sudah ada sebagai bahan untuk menyampaikan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan atau kepada masing-masing sekolah. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dilihat bahwa komite sekolah sangat memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan adanya pertimbangan dalam penentuan dan

---

<sup>11</sup> E. Mulyasa, *op.cit.*, h. 59.



pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat ditunaikan oleh masyarakat dalam urusan pendidikan.<sup>13</sup>

Pemberian wewenang yang besar dan luas kepada pihak sekolah, secara langsung atau tidak langsung melibatkan peran serta masyarakat sebagai konsekuensi logis keberadaan suatu sekolah dalam masyarakat. Guru pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, bahkan sebagian anggota masyarakat beranggapan bahwa guru ataupun tenaga kependidikan merupakan faktor penentu di bidang pendidikan. Masalah mutu pendidikan adalah sebagai salah satu tantangan dalam pendidikan.

Tanpa memperhatikan manajemen yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pendidikan, maka pemberian wewenang yang luas kepada kepala sekolah untuk mengatur sendiri rumah tangganya, tidak akan memberikan pengaruh berarti dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah bersangkutan dengan menumbuhkannya prakarsa, kreativitas maupun partisipasi komite dalam proses belajar

---

<sup>13</sup> UU No. 22 Tahun 2002 tentang *Komite Sekolah* [https://www.google.com/#q=uu\\_no\\_22\\_tahun\\_2002\\_tentang\\_komite\\_sekolah](https://www.google.com/#q=uu_no_22_tahun_2002_tentang_komite_sekolah) Mar 27, 2010, diakses tanggal 10 Desember 2013.

mengajar di MTs. Kaduaja. Dengan demikian maka berdasarkan alasan tersebut maka peneliti mencoba mengangkat sebuah judul “Bentuk kerjasama komite sekolah dengan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, maka sebagai acuan dasar pembahasan berikut ini akan diangkat tiga permasalahan utama, yaitu :

1. Bagaimana bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja?
2. Hambatan yang dihadapi komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja?
3. Upaya yang dilakukan komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja?

### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### 1. Manfaat Ilmiah

- a). Bagi pihak sekolah untuk mendorong peningkatan partisipasi komite sekolah dalam proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja di masa yang akan datang.
- b). Bagi praktisi pendidikan, masyarakat luas khususnya orang tua siswa yang mencari informasi tentang bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

##### 2. Manfaat Praktis

- a). Bagi peneliti yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut, terkait dengan hasil penelitian ini, sehingga lebih memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang pola hubungan komite sekolah dan guru dalam proses belajar mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- b). Hasil ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi yang bermanfaat dalam memperdalam tentang pengembangan Komite Sekolah di MTs. Kaduaja seperti : pembentukan Komite Sekolah, peran dan Komite Sekolah, pengorganisasian Komite Sekolah serta program-program yang dapat dikembangkan Komite Sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.

#### ***E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud pembahasan skripsi yang berjudul : “Bentuk Kerjasama Komite Sekolah dengan Guru dalam

Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja”, penulis akan menguraikan kata atau istilah yang dianggap penting sebagai berikut:

Bentuk kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, maka secara operasional yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan. Bentuk kerjasama dimaksud di sini adalah upaya dan tindakan komite dan guru memanfaatkan sumber daya sehingga tercipta situasi dan kondisi belajar mengajar yang memungkinkan sumber daya berjalan secara efektif, selektif dan efisien.

Ruang lingkup penelitian terdiri dari:

- a. Bentuk kerjasama
- b. Hambatan-hambatan
- c. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan

Dengan demikian komite sekolah yang terbentuk dari luar sekolah dan bukan merupakan suatu lembaga formal yang menjadi lembaga penentu terhadap proses pembelajaran, akan tetapi komite sekolah dalam hal ini adalah mempunyai peran dan tanggungjawab yang lewat pengawasan praktis terhadap pelaku pendidikan mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, dalam hal ini pengawasan terhadap objek pendidik atau guru dan kepala sekolah yang termasuk didalamnya kinerja dari masing-masing pelaku pendidikan.

## **F. *Garis-garis Besar Isi Skripsi***

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini maka akan ditampilkan garis-garis besar isi skripsi, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua merupakan kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, definisi, tugas, dan tanggung jawab komite sekolah, peranan komite sekolah dan guru dalam kegiatan belajar mengajar, profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar, dan kerangka pikir.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari sejarah singkat MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan, bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, hambatan yang dihadapi komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar, upaya yang dilakukan komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Keberadaan komite di sekolah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, ini tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas komite sekolah itu sendiri, dalam hal ini para komite sekolah selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap proses pendidikan, komite sekolah juga merupakan mitra dari sekolah dalam mensosialisasikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang keputusan di sekolah.

Penelitian lain yang dikaji tentang Partisipasi komite sekolah dalam pengembangan pendidikan Islam di SDN No. 004 Kalotok Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, oleh saudari Naenur tahun 2010.<sup>1</sup>

Saudari Nelmi, tahun 2010 juga mengangkat permasalahan tentang Hubungan keefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi komite sekolah dengan kinerja sekolah pada SDN 366 Leppangeng Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat dan

---

<sup>1</sup> Naenur, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di SDN No. 004 Kalotok Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi STAIN Palopo, 2010).

<sup>2</sup> Nelmi, *Hubungan Keefektifan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah dengan Kinerja Sekolah pada SDN 366 Leppangeng Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu*, (Skripsi STAIN Palopo, 2010).

kecepatannya. Namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa perbedaan-perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, latar belakang dan lingkungan fisik serta sosial masing-masing siswa, maka kemajuan belajar siswa-siswa yang setingkat (sekelas) mungkin tidak sama, ada siswa yang cepat, yang biasa dan lambat, ini tidak terlepas juga dari peran seorang komite sekolah dalam membantu proses pendidikan yang berlangsung, apakah dari pola pengajaran yang masih keliru ataukah memang standarisasi dari sekolah tersebut dalam pengambilan nilai atau hasil dari pada pendidikan yang berlangsung.

## ***B. Definisi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Sekolah***

### **1. Definisi Komite Sekolah**

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.<sup>3</sup>

Menurut Hadiyanto memberikan batasan pengertian “komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana Berta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti: (1) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan, (2) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan, (3)

---

<sup>3</sup> Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 45.

pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli, (4) pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional, (5) pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya, (6) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan atau buku), (7) pemberian kesempatan untuk magang, (8) pemberian pemikiran dan pertimbangan, (9) pemberian bantuan manajemen, dan (10) pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.<sup>4</sup>

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan kesepakatan kepercayaan yang dibangun dengan potensi masyarakat.

## 2. Tugas Komite Sekolah

Tugas Komite Sekolah adalah sebagai berikut : (1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) Pengontrol dalam rangka dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan transparansi akuntabilitas pendidikan, dan (4) Mediator antara pemerintahan (eksekutif dengan masyarakat pendidikan terutama orangtua siswa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 86.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 13.

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas ; (1) Unsur masyarakat (orangtua/wali), peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, duma usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik, dan (2) unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan. Anggota Komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya gasal.<sup>6</sup>

Komite Sekolah didirikan dengan tujuan; (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan, dan (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>7</sup>

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar budaya, demografis, kesepakatan kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Komite Sekolah merupakan suatu lembaga non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap

---

<sup>6</sup> Dirjen Depdiknas, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002), h. 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 11.

peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk Komite Sekolah pada setiap sekolah. Komite Sekolah sedapat mungkin bisa mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan Komite Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, sekolah berperan untuk dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik agar mampu melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan umat beragama serta pendukung kebudayaan bangsa. Hal ini memberikan suatu pemaknaan bahwa sekolah merupakan inti dari proses pendidikan guna mempersiapkan generasi muda untuk mengembangkan tugas sejarah dan budaya serta agama bangsanya.

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 14.

karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah.

### 3. Tanggung Jawab Komite Sekolah

Komite Sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolah pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Komite Sekolah bisa ikut serta untuk meneliti dari berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual sehingga dapat membantu guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Dewan pendidikan yang diterapkan terutama menyangkut berbagai dampak yang sudah atau mungkin terjadi dalam penerapan suatu kebijakan yang akan datang.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 15.

Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah (1) sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan dan (4) mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.<sup>10</sup>

Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yakni:

a. Penyusunan Rencana dan Program, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan pendidikan nasional, sekolah-sekolah bertugas untuk menjabarkan kebijakan pendidikan nasional menjadi program-program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Komite Sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah-sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah dimaksud. Atas nama masyarakat yang diwakilinya, Komite Sekolah dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah. Dalam penyusunan program pendidikan *life skill* yang dapat dilaksanakan oleh sekolah.<sup>11</sup>

Mekanisme yang mungkin dapat dilakukan adalah melalui rapat Komite Sekolah

---

<sup>10</sup> Dirjen Dikdasmen, *op.cit.*, h. 90.

<sup>11</sup> Notoatmodjo Soekidji, *Pengembangan Suberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 32.

dengan sekolah yang dilaksanakan setiap semester atau tahunan, untuk menyusun, memperbaiki serta menyesuaikan rencana dan program untuk semester berikutnya.

b. Penyusunan Rancangan Anggaran pendapat dan belanja sekolah (RAPBS) dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran kedepan perlu dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai dengan pos-pos pengeluaran pendidikan di tingkat sekolah. Dari sisi pendapatan, seluruh jenis dan sumber pendapatan yang diperoleh sekolah setiap tahun harus dituangkan dalam RAPBS, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kecamatan, maupun sumber-sumber lain yang diperoleh secara langsung oleh sekolah-sekolah. Dengan demikian, setiap rupiah yang diperoleh sekolah dari sumber-sumber tersebut harus sepenuhnya diperhitungkan sebagai pendapatan resmi sekolah dan diketahui bersama pihak sekolah (kepala sekolah, guru-guru, pegawai, serta para siswa) maupun oleh Komite Sekolah sebagai wakil stakeholder pendidikan, dari sisi belanja sekolah, seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan di sekolah harus diketahui bersama baik oleh pihak sekolah maupun oleh pihak Komite Sekolah, sesuai dengan rencana dan program yang disusun bersama oleh kedua pihak tersebut. Kedua sisi anggaran tersebut dituangkan ke dalam suatu rencana tahunan sekolah yang disebut dengan RAPBS yang harus disyahkan atas dasar persetujuan bersama antara pihak sekolah dan Komite Sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah.

Pelaksanaan program pendidikan sistem pendidikan pada masa orde baru, pelaksanaan pendidikan secara langsung dikendalikan oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang panjang sejak tingkat pusat, daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah tidak diberikan kesempatan untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dan pelaksanaan pendidikan. Kepala sekolah tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan untuk memecahkan berbagai permasalahan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing.<sup>12</sup>

c. Masa desentralisasi pendidikan ke depan, melalui paradigma MBS sekolah-sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat.<sup>13</sup> Keadaan seperti itu, maka dewan pendidikan dan Komite Sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah.

---

<sup>12</sup> Dirjen Dikdasmen, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Konsep Dasar Rencana dan Program Pelaksanaan, Panduan Monitoring dan Evaluasi, Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual)*, (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 65.

<sup>13</sup> Enoch, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara; Fowler G., et.all, 1998), h. 63.

d. Akuntabilitas pendidikan, dalam masa orde baru, satu-satunya pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pendidikan di sekolah-sekolah adalah pemerintah pusat. Pada waktu itu, pemerintah pusat telah menetapkan kaki tangannya di seluruh pelosok tanah air melalui pemeriksa, pengawas atau para penilik sekolah untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban sekolah-sekolah proses pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah.<sup>14</sup> Jika terdapat penyimpangan administratif yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru-guru, maka kepada mereka diberikan sanksi administratif, seperti teguran resmi, penilaian melalui DP3, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan sejenisnya. Namun, penilaian tersebut lebih banyak diberikan terhadap proses administrasi pendidikan dan hampir tidak pernah ada sanksi (*punishment*) atau ajaran (*rewards*) kepada guru-guru atau kepala sekolah atas dasar hasil-hasil yang dicapai dalam pembelajaran atau lulusan.

## **B. Peranan Komite Sekolah dan Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar**

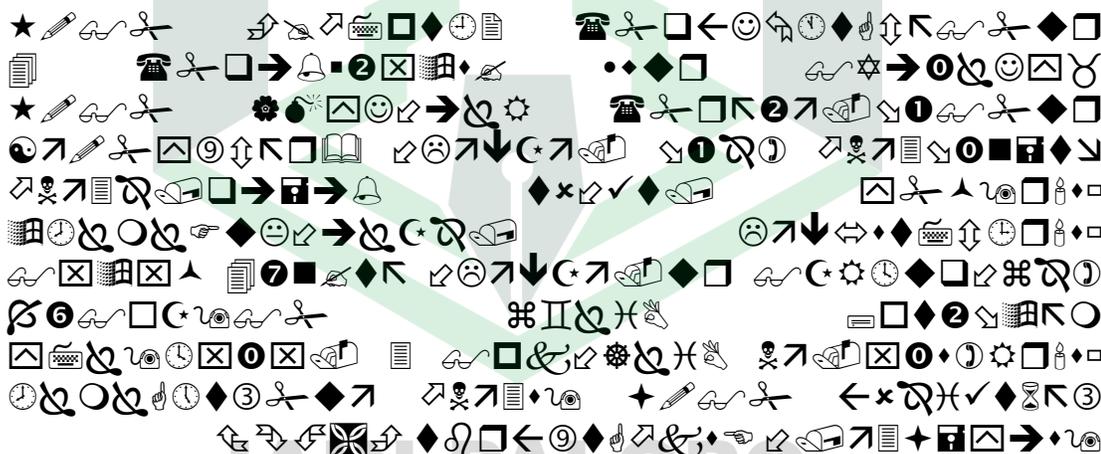
### **1. Peranan komite sekolah dalam kegiatan belajar mengajar**

Peranserta komite sekolah dominan adalah kebutuhan terhadap keberadaan pendidikan, apakah kebutuhan ilmu pengetahuan yakni pengembangan sumber daya manusia, atau kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor penghambat yang dapat saja timbul terhadap peran serta masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Notoatmodjo Soekidji, *op.cit.*, h. 28.

penyelenggaraan pendidikan, khususnya penerapan fungsi-fungsi manajemen adalah kesalahpahaman tentang peran dan tanggung jawab terhadap sekolah yang berhubungan dengan manajemen, mengingat betapa besar peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirinya, manusia hidup bersama dan berkelompok, saling membantu dan juga saling memberi karena jika saling tolong menolong tentu akan banyak memperoleh pahala, hal ini dapat didapatkan gambarannya terhadap ajaran Islam yang mewajibkan orang agar menjalin silaturahmi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mengarah kepada kebajikan. Seperti dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran / 3 : 103



Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan yang beraneka ragam ini manusia dituntut agar lebih memperdalam rasa persaudaraan untuk saling membantu dan saling bekerjasama demi kemashalatan umat manusia. Di dalam proses penyelenggaraan pendidikan peran serta masyarakat perorangan, maupun kelompok, dapat saja berlangsung penuh, dapat pula sebaliknya tergantung kepada kebutuhan.

Dari gagasan pokok tersebut, dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan khususnya pengelolaan sekolah, ada tiga bentuk peranserta masyarakat dalam pendidikan yakni: (1) Keterlibatan mental dan emosional masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (2) Kontribusi fisik anggota masyarakat untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (3) Tanggung jawab masyarakat untuk kelancaran jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Salusu menyatakan peran serta masyarakat lahir dari desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Keinginan untuk berperan serta juga terdorong kebutuhan akan kekuasaan, pengakuan. Manusia ingin berperan karena ingin dipandang sebagai milik dari suatu kelompok, ia berperan serta karena ada niat untuk membentuk dan mempertahankan harga diri, memperoleh otonomi, tanggung jawab, ia ingin memperoleh penghargaan bahwa ia mampu memberi pendapat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI., 2000), h. 61.

<sup>16</sup> J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stretetik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 18.

Persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif menurut Sahertian adalah sebagai: (1) untuk berpartisipasi dibutuhkan waktu, waktu yang dimaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pimpinan, (2) diperlukan dana perangsang, (3) subyek partisipasi hendaklah relevan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu bergabung, (4) partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, (5) partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan pada kebebasan dalam kelompok.<sup>17</sup>

Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses menyebabkan mereka akan berpartisipasi aktif dalam upaya memelihara dan melestarikan, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam skala tertentu masyarakat akan berperan aktif dalam memotivasi dan mengarahkan putra-putri mereka dalam masalah pendidikan, sehingga keberhasilan pendidikan dan kegagalan mereka adalah tanggung jawab bersama yaitu sekolah, masyarakat dan orangtua. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat / orangtua dalam pendidikan baik dalam lingkup masyarakat kecil maupun skala yang lebih luas, sebenarnya telah ada sejak dulu yang tercermin dalam berbagai bentuk dan ekspresi di masyarakat. Dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat, maka fungsi peran serta masyarakat ada 6 yakni: (1) Memperlancar penyelenggaraan pendidikan disekolah, (2) Membantu meningkatkan mutu pendidikan, (3) Membantu merawat dan merehabilitasi sekolah, (4) Membantu

---

<sup>17</sup> P.A., Sahertian, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program In Service Educational*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

pengadaan buku-buku perpustakaan, (6) Membantu penghijauan dan kerindangan sekolah, (7) Membantu keamanan dan ketertiban sekolah.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan kerjasama pihak lembaga pendidikan dengan masyarakat dibutuhkan adanya *sense of responsibility* (perasaan bertanggung jawab) dan *sense of belonging* (perasaan memiliki) dari kedua pihak, yakni pihak lembaga pendidikan dan masyarakat. Perasaan-perasaan itulah yang mendorong masyarakat untuk berperan dalam kegiatan pendidikan, baik dalam bentuk fisik seperti pengadaan sarana maupun non fisik dalam bentuk saran dan pendapat. Penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya adalah aktivitas menjalankan aktivitas pembinaan kepribadian, ilmu pengetahuan, dan keterampilan serta kematangan-kematangan emosional, spiritual, dan sosial. Penyelenggaraan bermakna pemeliharaan, atau perbuatan memelihara, sedangkan pendidikan adalah aktifitas usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera, serta keterampilan-keterampilan).

Dari konsep pendidikan tersebut nampak bahwasanya pendidikan hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>18</sup> Dirjen Dikdasmen, *op.cit.*, h. 54.

Oleh karena itu, orang tidak akan berperan aktif dalam pendidikan yakni dalam menciptakan gagasan-gagasan, membuat saran, memberitahukan preferensi mereka, dan mengekspresikan keprihatinan kalau tidak ada motivasi yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya / egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugasnya saja, dengan demikian keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikir dan perasaannya, atau misalnya anda berpartisipasi maka dapat dirasakan sendiri untuk melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan anda pun menyetujui atau berkenan untuk melakukannya.

Menurut Davies dalam bukunya *Organization of Activity* yang dikutip oleh Santoso menyatakan bahwa partisipasi mempunyai bentuk diantaranya yaitu beberapa pedoman untuk mendorong lebih banyak partisipasi terutama dalam pengambilan keputusan, yaitu (1) konsultasi dengan orang sebelum membuat perubahan yang mempengaruhi mereka, (2) menjelaskan usulan sementara, (3) mencatat gagasan dan saran, (4) membangun gagasan dalam bentuk saran, (5) berbicara praktis dalam mengekspresikan keprihatinan, (6) mendengarkan pandangan-pandangan yang menolak, (7) menggunakan saran dalam menghadapi keprihatinan, (8) memperlihatkan penghargaan atas saran. Sedangkan jenis dari partisipasi terdiri dari : (1) Pikiran (*psychological participation*), (2) tenaga (*physical participation*), (3) tenaga dan pikiran (*psychological and physical participation*), (4) keahlian

(*participation with skill*), (5) Barang (*Material participation*), (6) uang (*money participation*).<sup>19</sup>

Uraian-uraian tersebut memberikan isyarat bahwa peran serta komite sekolah merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah yang lebih menfokuskan pada perubahan tingkah laku peserta didik yang tentunya mengarah pada perubahan yang bersifat positif, yang tidak hanya mencerminkan hubungan yang baik terhadap sesama manusia, tapi juga sang pencipta.

Dalam rangka memberdayakan dan sekaligus meningkatkan profesionalitas komite sekolah sebagai salah pejabat fungsional, maka harus dilakukan upaya pengembangan dan pembinaan, baik volume, frekuensi maupun kegiatan kegiatannya. Menurut Danim bahwa dalam melaksanakan tugasnya, seorang komite sekolah tidak mungkin statis tetapi harus dinamis serta senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan prestasi hasil karyanya, karir serta fungsinya di sekolah.<sup>20</sup>

Untuk itulah kegiatan pengembangan sangat dibutuhkan baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Meskipun seorang komite telah memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan sebagai pengarah dan motivator, namun demikian efektivitas dan efisiensi serta peningkatan produktivitas kerjanya, maka kemampuan serta keterampilan perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan.

---

<sup>19</sup> Santoso, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1990), h. 65.

<sup>20</sup> Sudarwan Danim, *Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 60.

Pengembangan atau peningkatan kemampuan dan keterampilan ini dapat dilakukan secara pribadi atau secara institusional. bentuk pengembangan profesionalisme komite sekolah, antara lain melalui kegiatan penataran, konsultasi, pelatihan bagi komite sekolah, pendidikan formal.

Unsur menggambarkan maksud dan tujuan pengembangan organisasi ataupun lembaga pendidikan maka unsur terpenting adalah prestasi sangat penting dikembangkan yang merupakan suatu fungsi potensi organisasi. Untuk mencapai dan memelihara prestasi optimum memerlukan berbagai proses pengorganisasian yang memungkinkan orang dan program mewujudkan potensi mereka secara sepenuhnya.

Maksud pengembangan organisasi adalah mengembangkan kemampuan organisasi maupun lembaga didalam berbagai proses yang membantu mewujudkan potensi sampai titik dimana prestasi optimum diprogram secara teratur. Kenyataannya yang sering dijumpai kendala untuk memicu semangat belajar dan peningkatan metode pengajaran yang masih perlu penanganan yang lebih serius terutama bagaimana penyediaan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri yang terlebih dahulu harus terpenuhi sebagai salah satu syarat penunjang peningkatan sumber daya manusia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah terdapat banyak faktor penentu keberhasilan, tetapi yang dipandang sebagai kunci utama keberhasilannya adalah pengelolaan pengajaran, sedangkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengajaran di sekolah tersebut sangat ditentukan oleh kedisiplinan yang bersangkutan. Proses belajar mengajar yang efektif lebih menekankan pada belajar

mengetahui (*learning to know*), belajar dan bekerja (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to be together*).<sup>21</sup>

Salah satu penyebab yang memungkinkan kurangnya motivasi adalah kurangnya penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan hal ini tidak luput dari individu itu sendiri agar mereka memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik dimasa yang akan datang, tentu hal ini tidak terlepas dari peran serta atau partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengarahan kepada anak mereka tentang betapa bangganya orangtua jika kelak dapat menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara dan dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

## 2. Peranan Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar

Guru pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, bahkan sebagian anggota masyarakat beranggapan bahwa guru merupakan faktor penentu keberhasilan program pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan nasional secara umum adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut kemudian dilimpahkan kepada sebagian anggota masyarakat yaitu tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, karena itu sekolah yang efektif selalu selalu menciptakan iklim sekolah yang aman, tertib dan nyaman melalui pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut, dalam hal ini peranan kepala sekolah sangat penting. Pengelolaan ienaga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 61.

kependidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah di mana sekolah harus memiliki mutu, budaya mutu harus ditanamkan disanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme.

Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantung pada atasan, untuk menjadi mandiri sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Partisipasi dari warga sekolah dan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sekolah, dan masyarakat diharapkan bahwa partisipasi terhadap sekolah merupakan bagian dari kehidupannya. Unsur tersebut menggambarkan maksud dan tujuan pengembangan organisasi. Unsur tersebut adalah prestasi yang penting yang harus dikembangkan, yang merupakan suatu fungsi potensi organisasi.

Untuk mencapai dan memelihara prestasi optimum memerlukan berbagai proses pengorganisasian yang memungkinkan orang dan program mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Maksud pengembangan organisasi adalah mengembangkan kemampuan organisasi didalam berbagai proses yang membantu mewujudkan potensi sampai titik dimana prestasi optimum diprogram secara teratur.

### ***C. Profesionalisme Guru dalam Proses Belajar Mengajar***

Istilah yang erat kaitannya dengan kata profesionalisme ada 5 macam yaitu : profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme dan profesionalisasi. Pengertian

profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Dengan kata lain profesi merupakan pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarang orang. Sedangkan profesional adalah orang yang melaksanakan profesi yang berpendidikan minimal S1 dan mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Profesionalitas lebih mengarah kepada sikap anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Profesionalisme adalah komitmen anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Dan profesionalisasi adalah serangkaian proses pengembangan atau peningkatan kualifikasi para anggotanya dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi, baik dilakukan melalui pendidikan maupun latihan dalam prajabatan, dan jabatan yang berlangsung sepanjang masa.<sup>22</sup>

Jadi pengertian profesionalisme guru adalah nilai tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencahariannya.

Guru sebagai tenaga profesional akan lebih bagus kalau diketahui terlebih dahulu apa maksud kata profesi. Secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI., *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: 2001), h. 10.

digunakan sebagai prangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.<sup>23</sup> Guru yang profesional mampu membelajarkan siswa secara efektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya serta lingkungan. Namun, untuk menjadi guru yang profesional bukanlah hal yang mudah, karena tugas guru sangat berat dan kompleks.

Agar guru mampu memenuhi fungsinya sebagai pendidik bangsa, guru di sekolah dan pemimpin di masyarakat, maka secara garis besar dan persyaratan sesuai dengan tugas keprofesiannya, yaitu :

1. Memiliki kemampuan profesional,
2. Memiliki kapasitas intelektual,
3. Memiliki sifat edukasi sosial.<sup>24</sup>

Demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, Zakiah Daradjat menegaskan dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam* bahwa:

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebahagian tanggungjawab pendidikan yang dipikul di pundak para orangtua. Mereka tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti melimpahkan tanggungjawab pendidikan anak kepada guru. Hal itu menunjukkan pula bahwa orangtua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah karena tidak sembarang orang dapat menjadi guru.<sup>25</sup>

Yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat di atas intinya adalah setelah orangtua menyerahkan anaknya pada suatu sekolah berarti terjadi suatu serah terima

---

<sup>23</sup> Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 133.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.127.

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Aksara Baru 1992), h. 39.

tanggung jawab antara orangtua peserta didik dengan guru. Orangtua menyerahkan tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru, demikian pula guru menerima tanggung jawab itu dari orangtua peserta didik untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan inilah dibutuhkan kerjasama antara guru dan orangtua peserta didik. Guru bertanggungjawab atas pendidikan anak di sekolah, tetapi setelah anak kembali dari sekolah tanggung jawab untuk mendidik dan membina anak berada pada orangtua dan keluarga.

Hubungan yang terjalin antara orangtua dengan guru di sekolah bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak dalam proses belajarnya, karena salah satu faktor anak tidak bisa mendapat prestasi baik dalam bidang studi karena tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Pada sisi lain pentingnya hubungan antara orangtua dan guru, karena perbedaan motif dalam mendidik anak tersebut. Orangtua mendidik anaknya karena kodrat sebagai orangtua, berarti ia mendidik anaknya karena menjalankan tugas dari Allah swt., adapun guru dalam mendidik peserta didiknya karena jabatan. Hal ini dicermati pernyataan M. Ngalim Purwanto sebagai berikut :

Guru sebagai pendidik adalah lain dari pada orangtua. Orangtua menerima tanggungjawabnya sebagai pendidik dari Tuhan, atau karena kodratnya. Guru menerima tugas dan kekuasaan sebagai pendidik dari pemerintah atau negara. Ia diangkat dan ditunjuk serta ditetapkan oleh pemerintah, guru adalah pendidik karena jabatannya. Maka dari itu sudah sewajarnya pula bahwa kasih sayang guru terhadap murid-muridnya tidak akan sama dengan kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 149-150.

Berangkat dari perbedaan inilah hubungan kerja sama yang baik dibutuhkan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan adanya perbedaan itu akan memperoleh manfaat yang sangat berharga, jika dalam mendidik anak-anak pihak sekolah dapat menjalin kerja sama yang baik dengan orangtua peserta didik.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak dipengaruhi komponen-komponen belajar mengajar sebagai contoh bagaimana cara mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan, media yang digunakan dan lain-lain. Tetapi di samping komponen-komponen pokok yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu soal hubungan antara guru dan siswa.

Hubungan guru dan siswa atau anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis maka akan tercipta suatu hasil yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan *face to face* (langsung) antar guru dan siswa dengan menggunakan jam-jam di luar jam pertemuan dalam kelas.

Kegiatan belajar mengajar tidak hanya melalui presentasi di depan kelas bahkan sementara dikatakan bahwa metode presentasi tidaklah dianggap sebagai satu-satunya proses belajar yang efisien bila ditinjau baik dari segi pengembangan sikap dan pikiran intelektual yang kritis dan kreatif. Dengan demikian, bentuk kegiatan

belajar selain pengajaran di depan kelas, perlu diperhatikan bentuk-bentuk kegiatan belajar mengajar yang lain.

Bakat menciptakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat respon yang positif dalam lingkungannya. Dan sebaiknya, bakat tidak dapat berkembang dengan baik jika lingkungan tidak dapat memberinya kesempatan untuk berkembang dan tidak ada interaksi yang baik dan mendukung. Dalam hal ini faktor pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan perkembangan bakat seseorang.

Defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti di dalam definisi bakat yang dikemukakan Moke FJ., bakat mencakup tiga dimensi yaitu (i) dimensi perseptual, (ii) dimensi psikomotor, dan (iii) dimensi Intelektual. Ketiga dimensi itu menggambarkan bahwa bakat tersebut mencakup kemampuan dalam pengindraan, ketepatan dan kecepatan menangkap makna, ketepatan dan berpikir inteligen. Atas dasar bakat yang dimiliki maka setiap individu akan mampu menunjukkan kelebihan dalam bertindak dan menguasai serta memecahkan masalah.<sup>27</sup>

Dalam lingkungan sekolah sering kita temukan bahwa seseorang yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga, umunya prestasi mata pelajaran bidang lainnya juga baik. Tapi sebaliknya dapat terjadi prestasi semua bidang pelajarannya akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Agar bakat berkembang dengan baik maka perlu dilakukan cara-cara sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Moke. FJ. dkk., *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 168-169.

1. Selalu berusaha untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri anak.
2. Percobaan pendidikan bakat anak di bidang ruang.
3. Perlu adanya rasa gembira dalam mengembangkan bakat anak.
4. Mengembangkan bakat anak harus dengan hati-hati.
5. Senantiasa memahami perasaan anak.<sup>28</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat mewujudkan bakat dan prestasinya secara optimal, terletak pada :

- a. Anak itu sendiri, misalnya anak tersebut tidak atau kurang berminat untuk bakat-bakat yang ia miliki, atau kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau mungkin pula mempunyai kesulitan atau masalah pribadi sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan diri dan berprestasi sesuai dengan bakatnya.
- b. Lingkungan anak, misalnya orangtua yang kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang ia butuhkan atau ekonominya cukup tinggi tetapi kurang memberi perhatian terhadap pendidikan anak.<sup>29</sup>

Dengan mengadakan persiapan atau perencanaan yang baik maka guru akan tumbuh menjadi seorang yang ahli di dalam bidang pekerjaannya. Persiapan atau perencanaan yang baik itu harus didukung oleh pemikiran empat kemampuan dasar atau empat komponen.

- 1). Komponen-komponen desain pengajaran

---

<sup>28</sup> Sardiman AM., *op.cit.*, h. 77.

<sup>29</sup> Moke. FJ. dkk., *op.cit.*, h. 172.

Untuk menyusun suatu desain pengajaran, terdapat banyak komponen pengajaran yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam tugas sebagai desainer pengajaran. Menyusun desain pengajaran berarti memikirkan, merancang atau membuat ancangan dan mengembangkan sistem itu sendiri.

Setiap *desainer* harus memahami konsep pengajaran sebagai sistem beserta komponen-komponennya, sehingga diperlukan suatu kemampuan, kecermatan dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, komponen-komponen (desain) pengajaran ada dua, yaitu komponen pokok dan komponen penunjang.

a). Komponen pokok

(1). *Topic* atau pokok bahasan atau unik.

(2). *Entry behavior* atau situasi awal atau pengenalan karakteristik atau kemampuan bawaan peserta didik. Komponen ini merupakan pijakan untuk menentukan kegiatan pengajaran atau belajar.

(3). Tujuan pengajaran, baik Tujuan Umum Pengajaran (TUP) yang diambil dari GBPP setiap mata pelajaran, maupun Tugas Khusus Pengajaran (TKP) yang dirumuskan oleh guru dalam rangka menjabarkan TPU.

(4). Perumusan alat evaluasi atau penilaian yang menyangkut prosedur, pre-test dan post-test, tulis dan lisan, dan bentuk evaluasi, objektif atau essay, tes tindakan, sikap atau kemampuan kognitif.

(5). Perumusan materi atau isi pengajaran yang diharapkan untuk dikuasai peserta didik dan untuk mencapai rumusan tujuan pengajaran yang telah ditentukan.

(6).Merencanakan untuk kegiatan pengajaran, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dan kapan mereka harus terlibat aktif dalam pengajaran. Dalam kegiatan pengajaran, sebaiknya guru tidak banyak mendominasi kegiatan pengajaran sehingga memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif didalamnya.

(7).Sumber pengajaran atau belajar ini mencakup apa yang ada di luar individu dan memungkinkan mempermudah serta mendukung terjadinya *events* atau proses pengajaran atau belajar.

(8).Sumber ajar, maksudnya adalah pelaku atau pelaksana pengajaran itu sendiri, yaitu guru dan peserta didik.<sup>30</sup>

b). Komponen penunjang

Komponen penunjang yaitu pengajaran yang keberadaannya dapat membantu kelancaran, mempermudah pelaksanaan pengajaran seperti mengatur jadwal atau waktu pertemuan, tempat pengajaran, alat, ataupun fasilitas-fasilitas pengajaran yang akan menambah kelengkapan atau kesempurnaan kegiatan pengajaran juga prosedur atau pengaturan proses kegiatan yang baik dan sebagainya.<sup>31</sup>

Dengan demikian dalam pelaksanaan pendidikan secara formal, masyarakat memberikan kepada sekolah-sekolah suatu tanggung jawab untuk merangsang pertumbuhan kepribadian dan kemampuan melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan mempunyai sasaran tertentu dan tujuan terinci. Lembaga pendidikan ini menuntut adanya tenaga pendidik yang terdidik khusus, yaitu guru professional yang dalam

---

<sup>30</sup> Sardiman A.M., *op.cit.*, h. 80.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 86.

melaksanakan tugas dan kewajibannya merencanakan kegiatan-kegiatannya untuk sasaran tertentu berupa sejumlah pengalaman belajar dalam bentuk mata pelajaran dan latihan, menurut jenjang pendidikan dengan teknik dan metode yang dianggap efektif, dan sistem evaluasi yang dapat mengukur kemajuan belajar siswa.



**IAIN PALOPO**

#### **D. Kerangka Pikir**

Komite Sekolah dan guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam lingkungan sekolah.

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan memberdayakan serta melibatkan peran komite sekolah, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga. Itulah sebabnya maka melalui Komite Sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan sekolah, serata meningkatkan keterlibatan aktif dari komite sekolah di dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri, hal ini dapat digambarkan pada kerangka pikir di bawah ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif* yang bersifat *expost facto* yakni penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data dan menganalisis data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid baik yang bersumber dari pustaka maupun dari obyek penelitian (responden).

Jenis penelitian yang digunakan adalah *kualitatif*, dimana tahapan penelitian dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, tahap perencanaan dan melakukan identifikasi masalah. Kedua, tahap pengumpulan data. Ketiga, tahap pengolahan data dan keempat tahap penulisan laporan penelitian.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Sedangkan lokasi penelitian yang dipilih dalam melakukan observasi adalah di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

#### ***C. Sumber Data***

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik yang diperoleh dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan observasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>1</sup>

#### **D. Informan / Subjek Penelitian**

Dalam proses penelitian ini informan dipilih adalah sejumlah pengurus komite, kepala sekolah dan guru MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan serta orang tua siswa. Pemilihan subjek penelitian digunakan dengan metode *purposive sample* yakni pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi atau subyeknya kurang dari seratus maka lebih baik diambil semua. Tetapi jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10-15%, atau 20-25%.<sup>2</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam kegiatan penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh peneliti. Penggunaan data ini sifatnya lebih disesuaikan pada analisis kebutuhan dan kemampuan penulis itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dipilih sesuai dengan keperluan. Pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua cara yakni:

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 144.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 115-117

1. *Library Research*, yaitu penulisan pengumpulan data melalui buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Cara ini dilakukan dalam rangka memperoleh kerangka berfikir sebagai tolak ukur dalam suatu pembahasan yang berhubungan dengan materi dalam skripsi ini.

Pada *Research* kepastakaan ini, penulisan menggunakan kutipan langsung, yaitu mengutip karangan tanpa merubah redaksi aslinya, serta kutipan tidak langsung yakni penulis mengutip pendapat serta ide-ide yang akan dituangkan ke dalam redaksi penulis sendiri dengan mengubah sebagian redaksinya, baik isi maupun tanda bacaan tetapi maksud dan tujuan tetap sama dengan sumber aslinya, ikhtisar yaitu membaca buku atau sumber lainnya mengambil kesimpulan.

2. *Field Research* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelitian lapangan di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan yakni MTs. Kaduaja Kabupaten Tana Toraja.

b. Wawancara. Wawancara atau inteview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan guru untuk mendapatkan data autentik.

Mardalis memberikan pengertian wawancara dalam bukunya “*Metodologi suatu Penelitian Pendekatan Proposal*”, bahwa suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka secara langsung dengan orang berkompeten memberikan keterangan.<sup>3</sup>

c. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis yang dapat memberikan keterangan lebih lengkap, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, dalil, teori, atau hukum-hukum serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan instrument ini penulis menekankan sasaran, maksud dan tujuan. Hal ini dimaksud agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan sasaran penelitian yang ditetapkan semula.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Seluruh data yang dihimpun, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui cara: menganalisis data adalah suatu langkah yang sangat penting. Peneliti harus memastikan pola analisis yang digunakan yang sesuai dengan tata yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Induktif, yaitu pengolahan data yang bertitik tolak dari data yang khusus menjadi uraian-uraian yang bersifat umum.
2. Deduktif, yaitu cara pengolahan data yang bertitik tolak dari data yang umum, kemudian pengolahannya menjadi uraian atau suatu pemecahan yang bersifat khusus.

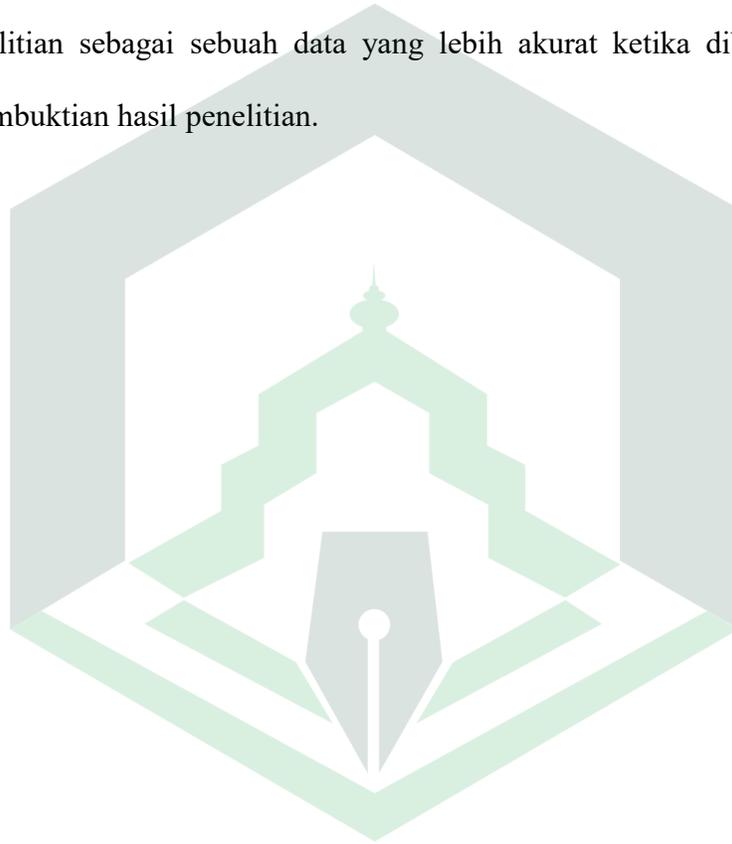
---

<sup>3</sup> Mardalis, *Metodologi suatu Penelitian Pendekatan Proposal*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 55.

<sup>4</sup> <http://budiwicaksono.wordpress.com/2013/01/27/metode-penelitian-triangulasi>. diakses pada tanggal 01 Juni 2013.

3. Komparatif, yaitu pengolahan data dengan jalan mengadakan suatu perbandingan dari dua atau lebih, kuat dan menarik suatu kesimpulan dari hasil perbandingan itu.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam mengolah dan mencari hasil penelitian sebagai sebuah data yang lebih akurat ketika dibutuhkan sebagai sebuah pembuktian hasil penelitian.



**IAIN PALOPO**

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### *A. Sejarah Singkat MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan*

MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja berdiri pada tahun 2003.<sup>1</sup> Seiring dengan berjalannya waktu setelah pemekaran daerah maka secara perlahan-lahan kondisi sekolah mengalami peningkatan baik secara fisik maupun non fisik. MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja terletak di jalan poros Kaduaja tepatnya di Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Letak sekolah ini sangat strategis karena selain berada ± 03 km dari ibu Kota Kecamatan. MTs. Kaduaja mempunyai luas wilayah ± 5.056 m<sup>2</sup> sehingga memudahkan untuk dijangkau karena kendaraan antara kecamatan dan kota melintas di depannya. Namun meskipun berada di jalan poros, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan jauh dari kebisingan kendaraan karena MTs. Kaduaja Gandang Batu Sillanan memiliki pekarangan yang sangat luas dan gedung-gedung kelasnya jauh masuk ke dalam sehingga suara kendaraan tidak terdengar dari ruang belajar.

Dalam usianya yang tergolong masih muda, maka MTs. Kaduaja mempunyai sejarah yang sedikit berbeda dengan sekolah lainya di kecamatan Gandang Batu Sillanan, serta mempunyai perkembangan yang cukup

---

<sup>1</sup> Data pada Kantor MTs. Kaduaja Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, 15 Mei 2013.

mengembirakan bagi pemerintah, masyarakat, terutama bagi mereka yang telah menimbah ilmu di lembaga tersebut. Hal ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak dalam memajukan proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di MTs. Kaduaja. Selanjutnya sejak berdirinya sekolah ini sudah mengalami tiga kali pergantian kepala sekolah, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2003-2006 dipimpin oleh bapak Awal Syukri, SS.
2. Pada tahun 2007-2010 dipimpin oleh bapak Kidjang, S.Pd.I.
3. Pada tahun 2011-sekarang dipimpin oleh Ridwan, S.Ag., M.Pd.I.<sup>2</sup>

Untuk mengetahui secara jelas kondisi objektif MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dapat diperhatikan dari beberapa aspek antra lain :

#### 1. Keadaan Guru

Guru adalah merupakan salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembinaan, khususnya dalam pembinaan agama dan pembinaan manusia seutuhnya, yakni utuh jasmani dan rohani, manusia yang berguna dalam pembangunan bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Ridwan selaku Kepala MTs. Kaduaja menyatakan bahwa dari berbagai tanggung jawab yang diemban oleh seorang guru, hal itu menunjukkan bahwa guru menempatkan bagian tersendiri dengan berbagai ciri

---

<sup>2</sup> Ridwan, Kepala MTs. Kaduaja, *Wawancara*, Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

kekhususannya. Demikian pula halnya dengan guru-guru yang ada di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja tidak terlepas dari tanggung jawabnya sebagai guru, tanggung jawab keprofesionalannya, maka guru harus memiliki sifat dan persyaratan (a). Kemampuan profesional, (b). Kapasitas intelektual, (c). Memiliki sifat edukasi sosial.<sup>3</sup>

Ketiga sifat tersebut di atas mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang dimaksud oleh penulis di sini adalah guru yang ada di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian ketiga sifat tersebut di atas, guru akan mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar.

Dengan demikian maka seorang guru bukan saja dituntut untuk mengajar saja, tetapi harus memberikan dorongan atau motifasi belajar serta membantu mengarahkan anak didik atau siswa pencapaian tujuan pendidikan. Begitu pula dengan guru-guru yang ada di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

Untuk mengetahui keadaan guru di, MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>3</sup> Ridwan, Kepala MTs. Kaduaja, *Wawancara*, Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

Tabel 4.1

**Keadaan Guru di MTs. Kaduaja Gandang Batu Sillanan  
Kabupaten Tana Toraja**

No	Nama Guru	Jenis Kelamin	Jabatan	Ket.
1.	Ridwan, S.Ag., M.Pd.I.	L	Kepala Madrasah	PNS
2.	Muh. Muchtar R., S.Ag.	L	Wakil Kepala	PNS
3.	Muhiddin, S.Pd.I.	L	Guru SKI	PNS
4.	Awal Syukri, S.S.	L	Guru IPS Terpadu	PNS
5.	Kidjang, S.Pd.I.	L	Guru Bhs. Arab	Non PNS
6.	Syarifuddin, S.Pd.	L	Guru Matematika	Non PNS
7.	Suleman Kenjeng, S.Pd.I.	L	Guru Penjaskes	Non PNS
8.	Marwati Pabian, ST.	P	Guru IPA Terpadu	Non PNS
9.	Fatimah, S.Pd.I.	P	Guru Mulok	Non PNS
10.	Sarifuddin Tahir, S.Pd.	L	Guru TIK	Non PNS
11.	Rastini, A.Ma.	P	Guru Aqidah Akhlak	Non PNS
12.	Natsir T., SS.	L	Guru Bhs. Inggris	Non PNS
13.	Hadis Santung, S.Pd.I.	L	Guru Mulok	Non PNS
14.	Rusli Tombilangi'	L	Satpam	Non PNS
15.	Nurhayati, SE.	P	Guru Ekonomi	Non PNS
16.	Anwar, S.Pd.	L	Guru Bhs. Inggris	Non PNS
17.	Nur Hera, S.Pd.I.	P	Guru Bahasa Arab	Non PNS
18.	Hasan Paewang	L	Bujang Sekolah	Non PNS
19.	Irma Darmayanti, S.Psi.	P	TU	Non PNS
20.	Muhammad Kadir, S.Pd.I.	L	Qurhas / Qira'ah	Non PNS
21.	Muh. Ismail	L	Pustakawan	Non PNS
22.	Abdul Saidir Amir, SE.	L	PKn	Non PNS

Sumber data : Kantor MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Ajaran 2013/2014

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dikepalai oleh 1 orang kepala madrasah, 18 orang guru, serta 3 orang staf yang mempunyai kualitas dan kapasitas ilmu yang luas. Kemampuan siswa MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dapat lulus dengan baik dan dapat diterima di sekolah

menengah atas. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kemampuan kepala sekolah sebagai penanggung jawab yang tinggi dari guru-guru atas profesinya.

## 2. Keadaan Siswa

Dalam dunia pendidikan formal, siswa merupakan objek atau sasaran utama untuk dididik. Jika tugas guru adalah mengajar, maka tugas siswa adalah belajar. Oleh karena itu keduanya amat berkaitan dan saling bergantung satu sama lain, tidak dapat dipisahkan dan berjalan seiring dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui dengan jelas keadaan siswa MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan tahun ajaran 2013/2014 dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Siswa DI MTs. Kaduaja Gandang Batu Sillanan**  
**Kabupaten Tana Toraja**

No	Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas VIIa	14	16	30
2.	Kelas VIIb	15	13	28
3.	Kelas VIIIa	16	12	28
4.	Kelas VIIIb	14	15	29
5.	Kelas IXa	12	11	23
6.	Kelas Ixb	8	9	17
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>	<b>76</b>	<b>155</b>

Sumber data : Kantor MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Ajaran 2013/2014.

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sebanyak 155 orang, dan untuk ke depan masih harus meningkatkan kualitasnya sehingga semakin banyak masyarakat yang mempercayakan pendidikan anaknya di sekolah ini yang diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah siswa.

### 3. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan proses belajar mengajar tidak saja ditentukan oleh adanya siswa dan pengajar yang profesional, akan tetapi ditentukan pula oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang cukup memadai. Demikian pula halnya dengan MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja harus meningkatkan kualitasnya, sehingga semakin banyak peminatnya.

Sarana pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat memperlancar proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran yang tersedia dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Apalagi dewasa ini kita senantiasa dituntut untuk menggunakan fasilitas mengajar yang memadai, karena situasi dan kondisi yang semakin modern akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu penulis akan mengemukakan tentang sarana dan prasarana di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan dalam hal ini sarana dan prasarana gedung dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan data tertulis yang diperoleh, dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana yang ada di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja cukup memadai. Sarana yang dimiliki MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

**Keadaan Sarana MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten  
Tana Toraja**

No	Jenis Sarana	Banyaknya	Keadaan Sarana
1	Ruang Kepala Sekolah	1	Permanen
2	Ruang Guru	1	Permanen
3	Ruang Tata Usaha	1	Permanen
4	Ruang Komite	1	Permanen
5	Ruang Tamu	1	Permanen
6	Ruang Kelas	6	Permanen
7	Perpustakaan	1	Permanen
8	Laboratorium	1	Permanen
9	Ruang BP	1	Permanen
10	Ruang Komputer	1	Permanen
11	W.C	2	Permanen
12	Mushollah/Masjid	1	Permanen

Sumber data : Kantor MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten  
Tana Toraja, Tahun Ajaran 2013/2014

Di samping fasilitas, sarana yang menunjang proses belajar mengajar, prasarana juga tidak kalah pentingnya karena keduanya sama-sama berperan dalam kegiatan belajar mengajar.

TAIN PALOPO

Tabel 4.4

**Keadaan Prasarana MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan  
Kabupaten Tana Toraja**

No	Jenis Prasarana	Banyaknya	Keterangan
1	Kursi/Meja Kepala Sekolah	1	Baik
2	Kursi/Meja Guru	20	Baik
3	Kursi/Meja Pegawai	6	Baik
4	Kuris Tamu	4	Baik
5	Kursi Meja Siswa	160	Baik
6	Mesin Ketik	4	Baik
7	Komputer	2	Baik
8	Tape Rekorder	2	Baik
9	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
10	Papan Struktur Organisasi	1	Baik
11	Papan Kalender Pendidikan	1	Baik
12	Papan Keadaan Siswa	1	Baik
13	Papan Struktur	1	Baik
14	Papan Data Guru	1	Baik
15	Lemari Buku	12	Baik
16	Jam Dinding	3	Baik
17	Rak Buku	6	Baik

Sumber data : Kantor MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, Tahun Ajaran 2013/2014

Memperhatikan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja masih belum cukup menunjang dalam segala kegiatan proses belajar mengajar sebab masih sangat kekurangan dalam prasarana teknologi seperti laptop dan internet.

## **B. Bentuk Kerjasama Komite Sekolah dan Guru dalam Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar**

Peran komite sekolah yang berada di suatu lembaga madrasah tidak terlepas dari fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dialah pemimpin. Begitu pula pengawasan komite karena pada hakekatnya supervisor adalah pengawas yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.

Keberadaan komite di sekolah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, ini tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas komite sekolah itu sendiri, dalam hal ini para komite sekolah selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap proses pendidikan, komite sekolah juga merupakan mitra dari sekolah dalam mensosialisasikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang keputusan di sekolah, terutama lagi bagi peningkatan mutu pendidikan agama Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka deskripsi data yang akan diuraikan adalah bentuk kerjasama komite sekolah dan guru, diuraikan sebagai berikut:

### 1. Mendorong partisipasi dalam memajukan pendidikan di sekolah

Mendorong partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Komite Sekolah agar komite sekolah ikut serta dalam memajukan sekolah, sebagai berikut: (1) melakukan pendekatan kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sekolah justru akan menguntungkan

---

<sup>4</sup> Safruddin, Ketua Komite Sekolah, "Wawancara", di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

masyarakat sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang, (2) menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang dapat mempengaruhi khalayak untuk ikut serta dalam memajukan sekolah, agar masyarakat kebanyakan dapat menjadi pengikutnya sekaligus memahami kepada mereka mengenai implementasi tugas dan fungsi komite sekolah, dan (3) memadukan keikutsertaan dalam memajukan sekolah dengan keinginan masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Kerjasama komite sekolah dengan masyarakat dan warga sekolah

Menurut Suleman K., selaku sekretaris komite memberikan pernyataan bahwa titik tolak komite sekolah meningkatkan kerja sama dengan individu, kelompok yaitu; (1) tumbuh keakraban antara komite sekolah dengan masyarakat, (2) tumbuh kepercayaan kepada pihak sekolah, Komite sekolah maupun masyarakat dan saling menghargai antara tugas dan fungsi masing-masing, dan (3) perbedaan antara masyarakat dan komite sekolah dapat diminimalkan.<sup>6</sup>

## 3. Evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan lulusan pendidikan di sekolah

Evaluasi terhadap sekolah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya analisis dari fakta-fakta mengenai kebijakan, program, penyelenggara dan keluaran pendidikan di sekolah serta membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Komite

---

<sup>5</sup> Safruddin, Ketua Komite Sekolah, “*Wawancara*”, di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

<sup>6</sup> Suleman K., Guru dan Sekretaris Komite Sekolah, “*Wawancara*”, di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

sekolah semata-mata untuk mengukur pelaksanaan dari hasil penyelenggaraan program pendidikan dan melihat keberhasilan keluaran di sekolah.

Komite sekolah pada MTs. Kaduaja sudah berjalan efektif, baik dalam hal memberikan dorongan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi demi kemajuan sekolah, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan warga sekolah. Berarti melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di MTs. Kaduaja, namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi karena adanya responden yang menyatakan masih kurang efektif bahkan ada yang menyatakan tidak efektif.

Kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga kependidikan lain adalah tenaga profesional yang terus menerus berinovasi untuk kemajuan sekolah, bukan birokrat berinovasi sekedar patuh menjalankan petunjuk atasan mereka. Konsep sekolah sebagaimana dikemukakan di atas mengacu kepada konsep sekolah efektif, yaitu sekolah memiliki profil yang kuat: mandiri dan inovatif yang kondusif bagi warganya untuk mengembangkan sikap kritis, kreatifitas, dan motivasi. Sekolah yang demikian memiliki kerangka akuntabilitas yang kuat kepada siswa dan warganya melalui pemberian pelayanan yang bermutu, dan bukan semata-mata akuntabilitas pemerintah melalui kepatuhannya menjalankan petunjuk.

Orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi secara aktif, karena sekolah dapat memenuhi kebutuhan mereka, menghargai ide-ide mereka, dan responsif terhadap aspirasi mereka, sekolah seperti inilah yang ingin diwujudkan melalui agenda reformasi pendidikan dalam konteks manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah. Konsep manajemen Berbasis sekolah (MBS) dalam bahasa Inggris disebut “*School Based Managemen*” merupakan strategi yang jitu untuk mencapai manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Konsep ini dapat diberikan sekolah kepada masyarakat dan juga apa yang relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat.

### ***C. Hambatan yang Dihadapi Komite Sekolah dan Guru dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar***

Kinerja sekolah dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan tuntutan siswa, untuk terjun ke dunia usaha dan sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi kompetitif secara global. Fenomena tersebut oleh pemerintah khususnya pihak sekolah, dan masyarakat segera diantisipasi dengan melakukan upaya perubahan dan penataan manajemen sekolah. Untuk memenuhi kemampuan kompetitif tersebut, masyarakat dan pemerintah sepakat melakukan reformasi terhadap manajemen sekolah yang mengacu pada kebutuhan kompetitif. Reformasi sekolah tersebut diterapkan untuk merespon kondisi pendidikan yang dinilai semakin terpuruk.

Keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan segenap,

masyarakat dan lingkungan, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Peran komite sekolah yang berada di suatu lembaga sekolah tidak terlepas dari fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dialah pemimpin. Begitu pula pengawasan komite karena pada hakekatnya supervisor adalah pengawas yang tugas pokoknya melakukan pengawasan hendaknya juga menghadapi berbagai kendala baik dari segi pengawasan dalam fungsi kepemimpinan maupun dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, serta pelaksana dalam fungsi pengawasan. Lebih terperinci dikemukakan fungsi pengawasan komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Dalam fungsi kepemimpinan, seorang pengawas hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut; (a) meningkatkan semangat kerja kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah yang berada di bawah tanggungjawab dan kewenangannya, (b) mendorong aktivitas dan kreativitas serta dedikasi seluruh personil sekolah, (c) mendorong terciptanya suasana kondusif di dalam dan di luar lingkungan sekolah, (d) menampung, melayani dan mengakomodir segala macam keluhan guru di sekolah dan berusaha membantu pemecahannya, (e) membantu mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan semua unsur terkait, (f) membantu mengembangkan kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah, (g) membimbing dan mengarahkan seluruh personil sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut, (h) menampilkan sikap keteladanan sebagai pengawas, (i) menampilkan sikap seorang pemimpin yang demokratis, (j) harus memiliki komitmen

yang tinggi bahwa kepala sekolah, guru dan staf sekolah bukan bawahan, akan tetapi merupakan mitra kerja.

Komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi tugas dan peran seorang komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu memberikan dampaknya kepengawasannya terhadap kinerja para guru dan pelaku pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seorang pengurus komite sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal; (a) mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah, guru dan staf sekolah sehingga diketahui dengan jelas apakah tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana atau tidak, (b) memantau perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, termasuk kemajuan belajar siswa pada sekolah bersangkutan, (c) melaksanakan pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi personil, materil, dan kurikulum, (d) mengendalikan penggunaan dan pendistribusian serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut, (e) mengawasi dengan seksama sebagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terutama dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, (f) di samping mengawasi, para pengawas juga melaksanakan fungsi penilaian dan pembinaan terhadap berbagai aspek yang menjadi tugas pokoknya.

Komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi tugas dan peran seorang komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu memberikan dampaknya kepengawasannya terhadap kinerja para guru dan pelaku pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

3. Dalam melaksanakan fungsi pelaksana, seorang personil komite sekolah hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut; (a) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (b) mengamankan berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan, (c) melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.

Komite sekolah adalah bukan merupakan tenaga pengajar di sekolah, akan tetapi tugas dan peran seorang komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di sekolah, juga mampu memberikan dampaknya kepengawasannya terhadap kinerja para guru dan pelaku pendidikan yang ada di sekolah tersebut, dalam pelaksanaan kinerja dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan kerelevansian aturan dan ketentuan yang sudah ada.

Dengan demikian komite sekolah yang terbentuk dari luar sekolah dan bukan merupakan suatu lembaga formal yang menjadi lembaga penentu terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, akan tetapi komite sekolah dalam hal ini adalah mempunyai peran dan tanggungjawab yang lewat pengawasan praktis terhadap pelaku pendidikan mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, dalam hal ini pengawasan terhadap objek

pendidik atau guru dan kepala sekolah yang termasuk didalamnya kinerja dari masing-masing pelaku pendidikan tersebut, dengan demikian peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan efektif, tinggal peningkatan yang lebih signifikan guna menunjang dari program kerja yang telah diterapkan di sekolah tersebut.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat berpengaruh dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah yang menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibangun suatu hubungan yang harmonis.

Dengan demikian peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis madrasah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada madrasah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Pemerataan pelayanan pendidikan

mengarah pada pendidikan yang berkeadilan, hal ini berkenaan dengan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan standar pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

#### ***D. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah dan Guru dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar***

Keberadaan komite di madrasah sangatlah bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, ini tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas komite sekolah itu sendiri, dalam hal ini para komite sekolah selain mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsinya terhadap proses pendidikan, komite sekolah juga merupakan mitra dari madrasah dalam mensosialisasikan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang keputusan di madrasah, terutama lagi bagi peningkatan mutu pendidikan agama Islam.<sup>7</sup>

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan di mana guru sebagai pemegang peranan penting dan utama, terutama dengan adanya perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar, membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya

---

<sup>7</sup> Safruddin, Ketua Komite Sekolah, "Wawancara", di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan guru dan kompetensi guru.

Berdasarkan hal tersebut Muh. Muchtar Rumbu selaku guru menyatakan bahwa dalam melaksanakan garis-garis besar program pendidikan, komite sekolah sebagai pengawas dalam proses pendidikan agama Islam harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan tujuan materi, pendekatan, metode dan penilaian. Di samping itu guru pendidikan agama harus menguasai sepenuhnya program tahunan, program catur wulan, analisis materi pelajaran, satuan pelajaran dan sebagainya.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Suleman K., selaku sekretaris komite, bahwa kegiatan belajar juga berkenaan dengan proses mental, seperti yang terdapat dalam proses belajar melalui bertanya, bertindak, mencari penyelesaian/pemecahan, menemukan problem, menganalisis, membuat sintesis, berfikir, menghasilkan / memproduksi, menyusun, menciptakan, mengharapakan, mengeksperimenkan, mengkritik, merancang, serta mengevaluasi dan menghubungkan.<sup>9</sup>

Berbagai kegiatan yang dilakukan siswa setelah melalui suatu proses belajar tersebut, diharapkan terjadi perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan pada diri siswa sebab rangkaian kegiatan dalam belajar itu adalah bertujuan dengan satu maksud bahwa dalam situasi formal di madrasah belajar tidak dapat dipisahkan dengan mengajar. Oleh karena itu, belajar bertujuan juga

---

<sup>8</sup> Muh. Muchtar Rumbu, Guru MTs. Kaduaja, "Wawancara", di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

<sup>9</sup> Suleman K., Guru dan Sekretaris Komite Sekolah, "Wawancara", di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

memanusiakan manusia yang ditandai dengan hubungan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan sekitar, serta hubungan dengan Allah swt., dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam petunjuk pendidikan agama Islam pada madrasah umum dikemukakan bahwa salah satu kepincangan pelaksanaannya ialah kurangnya keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, dan lingkungan masyarakat.

Menurut Nurhayati, selaku guru MTs. Kaduaja menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka dapat disepakati bersama bahwa peranan proses belajar cukup memegang peranan yang sangat penting. Belajar di madrasah senantiasa tidak berhasil secara mulus karena adanya hal-hal yang sering mengakibatkan kegagalan atau gangguan dalam pencapaian hasil perbuatan belajar. Hambatan tersebut dapat dianggap hal yang berada di luar kekuasaan untuk dihindari adanya, dan tidak seorang pun yang tidak mengalami dalam kehidupannya. Besar kecilnya hambatan itu sebenarnya sangat relatif, tergantung pada individu yang mengalami.<sup>10</sup>

Komite sekolah yang berperan sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di madrasah, juga mampu mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Sedangkan dengan itu, maka kegiatan belajar pendidikan agama meliputi interaksi belajar mengajar yang berlangsung baik di dalam kelas dan lingkungan madrasah, maupun di luar madrasah melalui kegiatan *intrakurikuler*, *kokurikuler*, dan *ekstrakurikuler*.

---

<sup>10</sup> Nurhayati, Guru MTs. Kaduaja, "Wawancara", di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

Para komite sekolah pada prinsipnya tidak terlibat secara langsung dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa, komite sekolah hanya mempunyai peranan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan besar bagi kemajuan dari proses belajar yang diterapkan di madrasah tersebut. Guru mempunyai tugas untuk melakukan hal-hal yang sangat penting, yaitu memberikan perhatian kepada siswa secara perorangan dan komite terbatas pada pengawasan dari program tersebut.

Selanjutnya menurut Muhiddin, selaku guru di MTs. Kaduaja menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di madrasah menempatkan anak sebagai subjek belajar. Dalam kegiatan belajar tersebut, anak didik berinteraksi dengan lingkungannya yang merupakan upaya perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan, seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru dan lain sebagainya. Karena itu, seorang pendidik sedapat mungkin memahami hakikat siswanya, yaitu anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Baik secara fisik maupun psikologi untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui suatu lembaga pendidikan, karena kesalahan dalam memahami hakekat siswa dapat menjadikan kegagalan pendidikan secara keseluruhan.<sup>11</sup>

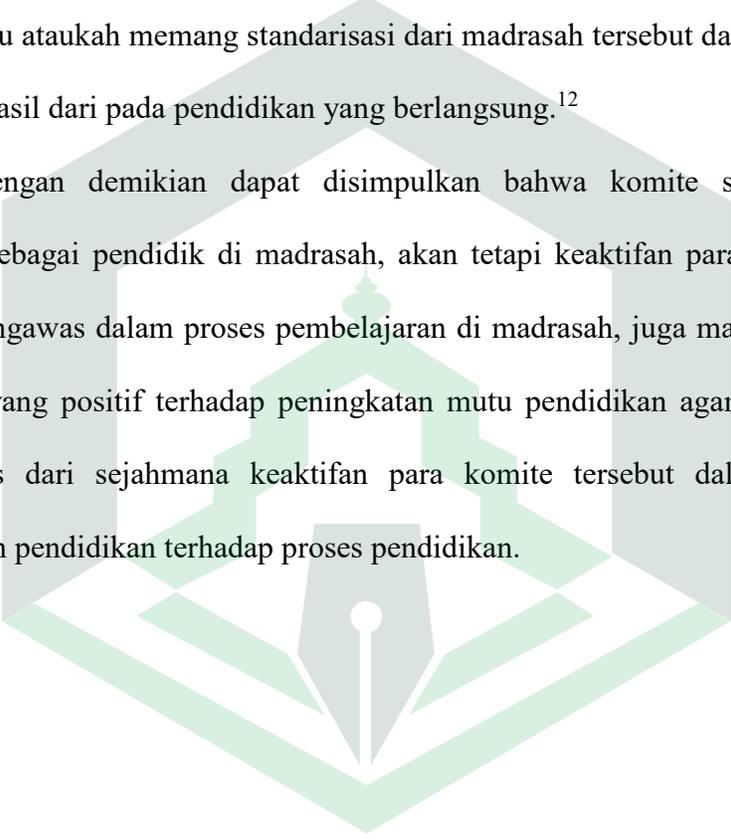
Selanjutnya Rostini selaku guru dan bendahara komite sekolah mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di madrasah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat dan kecepatannya. Namun dalam kenyataannya sering terjadi bahwa perbedaan-perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, latar

---

<sup>11</sup> Muhiddin, Guru MTs. Kaduaja, "Wawancara", di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

belakang dan lingkungan fisik serta sosial masing-masing siswa, maka kemajuan belajar siswa-siswa yang setingkat mungkin tidak sama, ada siswa yang cepat, yang biasa dan lambat, ini tidak terlepas juga dari peran seorang komite sekolah dalam membantu proses pendidikan yang berlangsung, apakah dari pola pengajaran yang masih keliru ataukah memang standarisasi dari madrasah tersebut dalam pengambilan nilai atau hasil dari pada pendidikan yang berlangsung.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite sekolah memang bukanlah sebagai pendidik di madrasah, akan tetapi keaktifan para komite sekolah sebagai pengawas dalam proses pembelajaran di madrasah, juga mampu mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam, karena tidak lepas dari sejauhmana keaktifan para komite tersebut dalam memberikan sumbangsih pendidikan terhadap proses pendidikan.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>12</sup> Rostini, Guru dan Bendahara Komite Sekolah , “*Wawancara*”, di Gandang Batu Sillanan, 15 Mei 2013.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kerjasama komite sekolah dan guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di MTs. Kaduaja: (a) melakukan pendekatan kepada masyarakat, (2) menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang dapat mempengaruhi khalayak untuk ikut serta dalam memajukan sekolah, dan (c) memadukan keikutsertaan dalam memajukan sekolah dengan keinginan masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja adalah kinerja sekolah pada saat itu dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan tuntutan siswa, keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan. pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya

3. Upaya yang dilakukan komite sekolah dan guru dalam mendukung proses belajar mengajar di MTs. Kaduaja ialah turut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, pengawasan praktis terhadap pelaku pendidikan mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil dari proses pembelajaran yang

berlangsung di sekolah, dalam hal ini pengawasan terhadap objek pendidik atau guru dan kepala sekolah yang termasuk didalamnya kinerja dari masing-masing pelaku pendidikan tersebut.

### **B. Saran - saran**

Setelah menyimak dari kesimpulan di atas, maka berikut akan disampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pengurus komite sekolah hendaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengurus komite harus mampu mengembangkan program kerja yang ditawarkan sekolah agar senantiasa berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dijadwalkan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.
2. Kepada para pengurus komite hendaknya dalam mengambil suatu kebijakan seyogyanya mampu berdiri diantara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa dan siswa itu sendiri, sebab mereka sebagai pengurus komite yang mempunyai peran sebagai jembatan yang objektif antara ketiganya harus mampu menempatkan pada posisi mana mereka berada agar tidak merugikan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam pelaku pendidikan, akan tetapi justru dengan kehadiran para komite sekolah justru lebih mengeratkan hubungan diantara ketiganya.
3. Kepada para siswa agar senantiasa dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah senantiasa lebih mengedepankan pola pembelajaran yang telah dijadwalkan oleh para guru dan komite sekolah, agar mampu mengembangkan profesional

individu yang tentunya akan memberikan hasil yang lebih maksimal, tentunya ini kaitannya dengan pendidikan agama Islam.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M., Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Ed. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ametembun, N.A., *Guru dalam Administrasi Sekolah, Pembangunan*, Bandung: IKIP Bandung, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1989.
- Danim, Sudarwan, *Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. II; Jakarta: Aksara Baru 1992.
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2000.
- Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Dirjen Depdiknas, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002.
- Dirjen Dikdasmen, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Konsep Dasar Rencana dan Program Pelaksanaan, Panduan Monitoring dan Evaluasi, Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Pembelajaran dan Pengajaran Kontekstual)*, Jakarta: Depdiknas, 2002.
- Dirjen Dikti, *UUD 1945*, Jakarta: 1988.
- Enoch, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara; Fowler G., et.all, 1998.
- FJ. Moke, dkk., *Psikologi Perkembangan*, Cet. IV; Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hasil Observasi MTs. Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

<http://budiwicaksono.wordpress.com/2013/01/27/metode-penelitian-triangulasi>.  
diakses pada tanggal 01 Juni 2013.

Kunandar, *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*, Edisi I; Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mardalis, *Metodologi suatu Penelitian Pendekatan Proposal*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah, (Konsep, Strategi dan Implementasi)*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.

Naenur, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di SDN No. 004 Kalotok Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*, Skripsi STAIN Palopo, 2010.

Nelmi, *Hubungan Keefektifan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah dengan Kinerja Sekolah pada SDN 366 Leppangeng Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu*, Skripsi STAIN Palopo, 2010.

Nurcholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Nurkencana, Wahid, *Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996.

Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan*, Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Republik Indonesia, Departemen Agama, *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: 2001.

Sahertian, P.A., *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program In Service Educational*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Salusu, J., *Pengambilan Keputusan Stretetik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Santoso, *Perilaku dalam Organisasi*, Cet. II; Jakarta: PT. Erlangga, 1990.

Soekidji, Notoatmodjo, *Pengembangan Suberdaya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Armas Duta Jaya, 2008.